

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR PERIKANAN
(Studi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo di Blitar)**

***THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN REALIZING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FISHERIES SECTOR
(Study of Tambakrejo Beach Fishing Development Port in Blitar)***

Ferida Asih Wiludjeng
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ. Islam Balitar
Jl. Majapahit No. 2 - 4 , Blitar 66139, Email: wiludjeng02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo di Blitar, serta faktor-faktor penghambat peran pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah dari informan yang merupakan pegawai dari UPT di wilayah Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berperan memberikan berbagai Fasilitas pelabuhan, pengawasan dan pengendalian pelabuhan guna menertibkan para nelayan yang berlayar serta terjaganya ekosistem perikanan. Dalam proses perkembangannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo Kabupaten Blitar terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bertugas merawat dan menjaga bangunan pelabuhan, kurangnya kepedulian pengguna jasa terhadap pelabuhan perikanan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Peran Pemerintah, Sektor Perikanan

ABSTRACT

This study aims to determine and explain the role of the government in realizing sustainable development in the fisheries sector in the development of Tambakrejo Beach Fisheries Port in Blitar, as well as the inhibiting factors of the government's role in realizing sustainable development in the fisheries sector. This study uses a qualitative approach type of descriptive research. The source of the data obtained is from informants who are employees of the UPT in the Blitar region. The results of this study indicate that local governments have played a role in providing port facilities, supervision and control of ports to bring order to fishermen who sail and maintain fisheries ecosystems. In the process of development, Tambakrejo Beach Fisheries Port in Blitar Regency has several inhibiting factors, namely the lack of human resources in charge of maintaining and maintaining port buildings, lack of concern for service users towards fishing ports.

Keywords: Sustainable Development, Role of Government, Fisheries Sector

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati laut yang luar biasa ini seharusnya dapat membantu Indonesia bukan sekadar keluar dari krisis ekonomi, melainkan dapat menghantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur dan mandiri (Mahyudin, 2008). Salah satu propinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur memiliki luas perairan 110.000,00 km² dengan wilayah 12 Pantai Utara). Memiliki panjang garis pantai 1900 km dan 446 pulau. Sebanyak 23 daerah dari 38 kabupaten / Kabupaten atau lebih 60% merupakan wilayah pesisir. Jasa maritim, pulau-pulau kecil, kekayaan tambang dan mineral, perikanan dan budidaya laut serta industri kelautan merupakan aset yang terabaikan..

Menurut Mahyudin (2008) agar proses pelelangan ikan ini berjalan dengan baik, pemerintah telah membangun tempat pelelangan ikan yang ada di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang tersebar diseluruh Indonesia. PPI merupakan pusat kegiatan pelelangan ikan. Dengan berfungsinya tempat pelelangan ikan untuk aktifitas tersebut maka semakin meningkatkan peranan suatu pelabuhan perikanan.

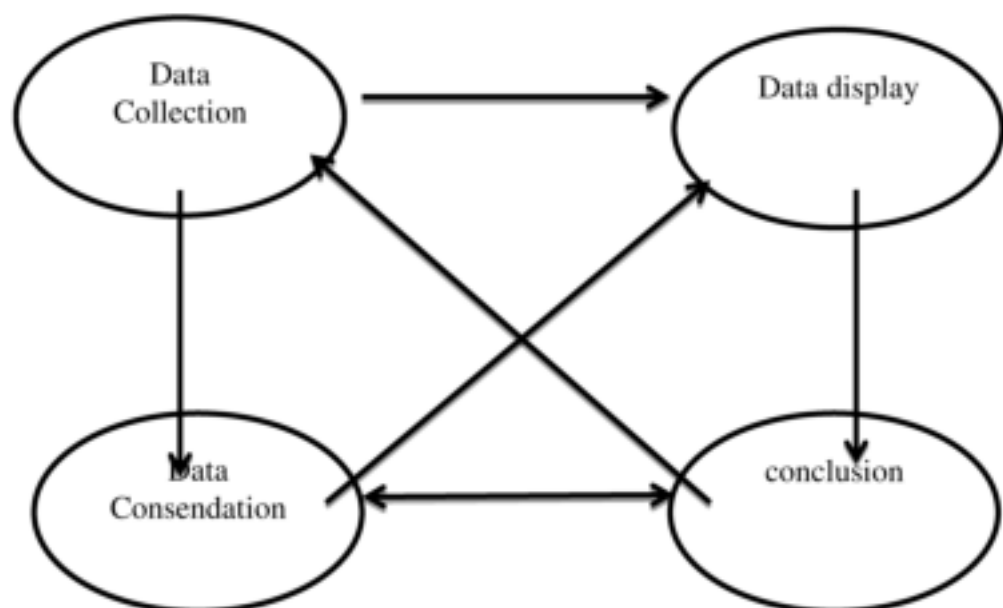
Berdasar Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 pasal 65 tentang perikanan disebutkan bahwa pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan perikanan kepada pemerintah daerah dan menugaskan untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan, termasuk di sini proses mengatur tata niaga perikanan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Tujuan pengaturan tata niaga oleh pemerintah agar proses tata niaga ikan berjalan tertib sehingga nelayan sebagai produsen dan pembeli atau konsumen sama-sama memperoleh manfaat dan saling menguntungkan.

Dari berbagai latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Sejauhmana peran Pemerintah daerah untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo di Blitar? 2. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo di Blitar?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini, dalam membahas dan menyajikan data menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini yaitu untuk membuat deskripsi, yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Behubungan dengan hal ini Taylor dan Bogdan (1984) dalam Sutinah, Suyanto, dan Bagong (2010) menerangkan bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan analisis data dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman (1992). Analisis data kualitatif terdapat empat (4) tahap kegiatan aktifitas penelitian antara lain: *Data Reduction*, *Data Display*, *Data Collection* dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Analisis ini disebut dengan analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen dan tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai TambakrejoBlitar.

Penyedia Sarana Fasilitas Fasilitas yang disediakan oleh PPP Tambakrejo Blitar sangat banyak dan lengkap. Kelengkapan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dari nelayan 110 untuk menangkap ikan dan transaksi penjualan ikan. Dari Fasilitas pokok merupakan sarana penyelenggaraan dan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo Blitar, Fasilitas fungsional adalah Fasilitas yang difungsikan dalam penyelenggaraan operasional pelabuhan, yang mana keberadaan Fasilitas ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan lainnya yang memanfaatkan pelayanan pelabuhan, dan yang terakhir Fasilitas penunjang yang merupakan sarana pelengkap dalam mendukung keberadaan penggunaan baik Fasilitas pokok maupun Fasilitas fungsional. Seluruh sarana Fasilitas pelabuhan tersebut sudah diatur oleh pemerintah untuk membantu nelayan dan pengguna jasa yang lain dalam kegiatan menangkap ikan ataupun pelelangan ikan serta menjaga ketertiban di laut ataupun di pelabuhan.

Dalam melaksanakan pelayanan prima oleh pemerintah terhadap pengguna jasa dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penataan pelayanan pengurusan dokumen yaitu meningkatkan kenyamanan pengguna jasa dalam pengurusan dokumen Kesyahbandaraan.
2. Penambahan Fasilitas pendukung keamanan yaitu menjamin keamanan pengguna jasa.
3. Penataan manajemen penanganan sampah yaitu meningkatkan nilai kebersihan lingkungan.
4. Penanganan limbah kapal yaitu mencegah pencemaran lingkungan laut area pelabuhan.
5. Penataan PKL yaitu menata ketertiban pengunjung dan kegiatan Non Perikanan.

6. Penambahan sarana pemadam kebakaran (Hidrant) yaitu mengantisipasi kecelakaan kerja.

Peran pemerintah sebagai penyedia sarana Fasilitas terbaru yang dibutuhkan dalam operasional pelabuhan sudah sesuai pendapat dari Siagian (2006) dimana peran pemerintah sebagai modernisator melalui Pembangunan setiap negara yang menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan Pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern seperti itu. Dengan peran tersebut, PPP Tambakrejo sebagai wakil dari pemerintah provinsi Jawa timur dalam pengelolaan pelabuhan memang sudah seharusnya menyediakan Fasilitas modern yang dibutuhkan dalam operasional pelabuhan untuk pengembangan Pembangunan berkelanjutan pelabuhan.

Pelabuhan PPP Tambakrejo dalam pengembangan pelabuhan tersebut menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2004 tentang pelabuhan perikanan pada ketentuan umum pasal.

1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan Sistem Bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan berbagai Fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.

Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sudah di laksanakan dengan baik oleh PPP Tambakrejo dengan menyediakan seluruh baik Fasilitas pokok, Fasilitas fungsional maupun penunjang operasional pelabuhan.

2. Membuat Perencanaan dan Tindakan Pengendalian dan Pengawasan atas penangkapan ikan laut pada sumber daya Kelautan dan Perikanan. Tugas pokok Pelabuhan Tambakrejo salah satunya melalui *syahbandar* yaitu mengendalikan dan mengawasi penangkapan ikan.

Setiap akan berlayar dan menangkap ikan nelayan seharusnya sudah mengurus Surat Ijin Berlayar (SIB) serta Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Dari data syahbandar sudah terlihat bahwa jumlah dari kapal, hasil penangkapan ikan maupun alat yang dipergunakan untuk menangkap apa saja. Pihak pelabuhan sendiri sudah seharusnya melakukan kegiatan sosialisasi tentang dokumen kapal dan alat penangkapan ikan yang sah dan baik dalam menangkap untuk tindakan preventif dalam kegiatan ilegal *fishing* Pemerintah daerah selaku salah satu stakeholders dalam setiap tahap kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sedangkan menurut Setiadi dkk. (2008), menyebutkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimisasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (socio-politik atau alam) dalam waktu yang terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi di bawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.

Dalam pelaksanaannya pengendalian pelabuhan ini menurut Triatmono (2002) yaitu menjaga kekayaan harta milik perusahaan dan catatan organisasi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian pelabuhan juga sama yaitu agar sumber daya alam yang dikelola bisa digunakan dengan sebagaimana

mestinya sesuai peraturan yang berlaku maka dilakukanlah pengawasan untuk pengelolaan tersebut.

Sedangkan pengawasan pada sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini sesuai dengan pendapat Mitchell dkk. (2007), menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Menurut Fathoni (2006) mendefinisikan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hasil yang diinginkan pelabuhan PPP Tambakrejo dalam hal ini yaitu meningkatkan mutu dan kualitas hasil perikanan, meningkatkan Fasilitas pelabuhan sesuai dengan masterplan, mendukung upaya pemberantasan usaha penangkapan ikan secara ilegal, tidak tercatat dan tidak sesuai aturan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengendalian dan Pengawasan merupakan hal penting dalam perencanaan manajerial di pelabuhan.

2. Faktor-faktor yang menghambat peran pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tambakrejo Blitar

Masalah Pembangunan terjadi dikarenakan adanya perbedaan antara pemikiran Pembangunan dan kebijakan sentralistis. Menurut Suryono (2006), strategi Pembangunan lebih menekankan pada akumulasi kapital fisik, yang mengabaikan hubungannya dengan kapital-kapital lain seperti kapital alami, kapital manusia dan kapital sosial. Kebijaksanaan yang tidak fokus (*misleading policies*) ini tercermin sebagai keuntungan yang didapat oleh Kota-Kabupaten yang besar, terutama yang berlokasi di Pulau Jawa, mengalami transfer sumberdaya interregional, merupakan penerima manfaat dari sistem pemerintahan Indonesia yang terpusat.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) berpendapat bahwa ancaman terhadap kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikarenakan oleh salah kelola dalam pengelolaan ekonomi baik di waktu yang lalu maupun sampai sekarang, di

mana bersumber dari kesalahan konsepsinya maupun dalam organisasi pelaksana programnya.

Sebaliknya apabila dilihat dari permasalahannya, terjadi keterlambatan bahkan stagnan/terhentinya Pembangunan pelabuhan menurut penulis yang telah dibicarakan bersama masyarakat Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Kualitas perawatan yang kurang

Kualitas perawatan yang kurang ini berhubungan dengan bangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah akan tetapi tidak dimanfaatkan sesuai rencana, 116 selain itu juga ada beberapa komponen bangunan yang rusak tidak mendapat perhatian dari pengelola. Pihak PPP Tambakrejo tidak mau disalahkan dengan masalah ini, karena mereka sendiri terbatas pada Penganggaran dan potensi manusia. Pada kondisi lapangan, sampai saat ini masih belum banyak hal yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam mengatasi masalah ini.

Siagian (2003) merumuskan ciri-ciri Administrasi Pembangunan sebagai berikut:

1. Banyak memperhatikan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang.
2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan Pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan, Administrasi ikut serta memengaruhi tujuan-tujuan Pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya dalam proses politik.
3. Fokus pada Usaha Perubaha ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan.
4. Berorientasi pada implementasi tugas-tugas Pembangunan dari pemerintah. dan lebih bersikap sebagai *development agent*, yaitu merumuskan kebijaksanaan Pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan Pembangunan.

5. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan Pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain
6. Administrator dalam Aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan.
7. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsure ini disebut *mission driven*.

Banyaknya bangunan yang dibangun seharusnya sudah sesuai dengan sumber daya manusia yang akan dibangun untuk mengelolanya, hal ini sesuai pendapat Triatmono (2002) untuk mencapai hasil maksimal maka perencanaan dan perancangannya dalam masalah operasional meliputi penilaian terhadap penggunaan sarana pelabuhan (alur pelayaran, kolam pelabuhan, tambatan, gudang, jalan) diupayakan dapat berdaya guna sehingga kelancaran arus barang, lalu lintas kapal dan kegiatan lain dapat seimbang terhadap penilaian hasil kerja yang disyaratkan.

b. Kurang tepatnya sarana yang ada

Ada beberapa Fasilitas yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat nelayan. Ketidaksesuaian ini contohnya ada pada kolam labuh kapal yang terlalu luas dan bibir kolam yang menghadap ke laut. Kondisi ini tidak seperti yang nelayan harapkan, karena dengan Fasilitas tersebut ketika musim angin gending berakibat gelombang tinggi dan juga kapal yang berlabuh di dermaga akan bertabrakan.

Dalam kasus ini ketika musim angin dan terjadi ombak tinggi yang masuk kolam labuh nelayan memilih melabuhkan kapal mereka ke pelabuhan lama, yaitu pelabuhan tanjung tembaga. Untuk mengatasi masalah ini PPP Tambakrejo akan melebarkan dan meninggikan dinding kolam sehingga mampu memecah gelombang dengan baik.

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo sebagai salah satu stakeholder dalam setiap kebijakannya harus mampu mengakomodasikan keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lokal. Fauzi dkk. (2001) dalam pendapatnya pemerintah daerah harus mengikutsertakan secara aktif masyarakat dan penduduk lokal sebagai pihak-pihak yang paling menentukan

dalam pembuatan kebijakan, melaksanakan, dan Tata Kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam Pembangunannya pelabuhan Tambakrejo seharusnya melibatkan masyarakat pengguna jasa tersebut sehingga pembangunan pelabuhan sesuai yang diharapkan seperti masalah teknis meliputi pemilihan letak ditinjau terhadap gangguan alam, teknis konstruksi (mekanika tanah, pondasi, mekanika teknik, beton atau baja atau kayu teknik lalu lintas), pelaksanaan pada saat Pembangunan (network planning), ukuran perkiraan kolam labuh kapal dan jenis kapal yang ditampung di pelabuhan.

c. Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna jasa

Kepedulian masyarakat nelayan pada PPP Tambakrejo masih rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan beranggapan bahwa PPP Tambakrejo disediakan untuk mereka. Petugas yang ada di PPP Tambakrejo dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang masuk ke PPP Tambakrejo jarang ada yang mau membayar retribusi. Selain itu, mereka meletakkan barangnya secara sembarangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan ketertiban dan kebersihan PPP Tambakrejo.

Dalam pelaksanaannya Pembangunan pelabuhan ini seharusnya dapat berjalan dengan lancar dan baik karena Fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah sudah maksimal. Kaho (1997) juga mengungkapkan penyelenggaraan Pembangunan daerah yang sehat dan baik akan berjalan lancar apabila manusia pelaksanaannya baik. Dalam posisi ini manusia sangat penting karena manusia merupakan unsur dinamis dalam operasional organisasi yang bertindak roda perusahaan.

Menurut pendapat Profesor Goulet dan tokoh-tokoh lainnya (Todaro, 2000) terdapat 3 komponen atau nilai inti yang dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti Pembangunan yang hakiki, yaitu:

1. Kecukupan

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi sandan, pangan, papan, kesehatan, keamanan. Apabila dari kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka akan muncul "*Keterbelakangan Absolute*". Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi, pada hakikatnya adalah untuk

menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang dilengkapi perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan dan ketidakberdayaan akibat kekurangan kebutuhan dasar tersebut. Atas dasar inilah, kita bisa menyatakan bahwa keberhasilan Pembangunan ekonomi merupakan prasarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

2. Harga diri

Komponen dari kehidupan yang lebih baik adalah adanya dorongan diri sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu dan seterusnya.

3. Kebebasan dari sikap menghambat kemampuan untuk memilih.

Untuk melibatkan itu semua penduduk asli setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan Pembangunan pelabuhan serta lingkungan setempat karena pemahaman Pembangunan tradisional mereka. Pemerintah harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya, dan keinginan penduduk setempat serta memaksimalkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai Pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini membentuk UPT PPP Tambakrejo Kabupaten Blitar sebagai pelaksana, telah berperan penting dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di sektor pelabuhan dalam pengembangan PPP Tambakrejo di Kabupaten Blitar dengan :
 - a. Menyediakan Fasilitas dibutuhkan oleh para nelayan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam operasional di lingkup PPP Tambakrejo Kabupaten Blitar.
 - b. Melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap penangkapan ikan melalui pelaksanaan perijinan berlayar (SIB) dan perijinan penangkapan ikan (SIPI), dengan membentuk seksi Kesyahbandaran sebagai seksi yang berwenang

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di sector pelabuhan, yaitu:
 - a. Belum lengkapnya instansi yang ada serta kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam perawatan Fasilitas PPP Tambakrejo Kabupaten Blitar sehingga banyak bangunan Fasilitas yang tidak terawat dengan baik atau bahkan terbengkalai
 - b. Terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan nelayan dengan Fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah, sehingga penggunaan beberapa sarana dan prasarana yang sudah disediakan menjadi tidak maksimal.
 - c. Tingkat pemahaman masyarakat pelaku perikanan yang masih rendah terhadap kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan seperti halnya dokumen kapal dll, selain itu. Kurangnya kepedulian pengguna jasa yaitu pedagang, nelayan dan masyarakat yang seringkali tidak membayar biaya retribusi masuk PPP Tambakrejo, serta meninggalkan sampah yang berserakan baik di area pelelangan ikan maupun di area breakwater yaitu tempat yang sering dikunjungi masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, A. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Bandung.
- Fauzi, A. dkk. 2001. *Merubah Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Kaho, J.R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Mahyudin, B. 2008. Peranan Pelelangan Ikan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (studi kasus penangkapan ikan di Pelabuhan Ratu). <http://tumoutou.net/> diakses tanggal 3 April 2018
- Miles, W. M. B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mitchell, B, dkk. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan*. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Membangun Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PTT*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Setiadi dkk. 2008. Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Semarang. *Riptek*, 1(2):1-15.
- Siagian, S.P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Srateginya Edisi Kedua*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagian, S.P. 2006. *Patologi Birokrasi, Analisis dan Terapinya*. Ghalia. Jakarta.

- Suryono, A. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspekti Ilmu Sosial*. UM Press. Malang.
- Sutinah, Suyanto, dan Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih bahasa, Haris.
- Triatmono, B. 2002. *Pelabuhan Perikanan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.